

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- , *Hukum Tata Negara Darurat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- , *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I Jakarta: Sekretaria Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- , *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- AZ, Lukman Santisi, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Sleman: IAIN Po Press, 2016.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, edisi revisi cetakan keempat.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Dkk, Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Dkk, Isnawati, *Hukum tata Negara Indonesia: Teori, Historis, dan Dinamika I*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 60.

- Dkk, Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- el-Saha, Ishom, *Metodelogi Riset dan Studi Hukum Islam di Indonesia*, Bekasi: alif.id, 2020.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1997.
- Hartiwiningsih, dkk, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*, Bogor: UNIDA Press, 2019.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI; Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, cetakan ketigabelas.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Sleman: PT Kanisius, 2007, Jilid I.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Kansil, C.S.T, Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, edisi revisi.
- Mahfud MD, Moh, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- MPR RI, Badan Pengkajian, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017.

- MPR RI, Sekretariat Jenderal, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MR RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018.
- MPR RI, Sekretariat Jenderal, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018, cetakan ketujuhbelas.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Muhshi, Adam, *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Mulyawan, Rahman, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2015.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bantul: Kaukaba, 2013.
- Penyusun, Tim, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Penyusun, Tim, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Ridho, Zainor, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Rosadi, Otong, *Hukum Tata Negar Indonesia: Teks dan Konteks*, Sleman: Deepublish, 2015.
- Subekti, Valina Singka, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2018, cetakan ke enam.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 cetakan ke-6.
- Tutik, Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Widayanti, *Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: UNISSULA Press, 2016.

Jurnal

- Asrun, A. Muhammad, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol. 4 No. 1 (2016).
- Efendi, Muhammad Fadli, "Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum", *Jurnal Varitas et Justitia*, Vol. 7 No. 2 (2021).
- Haniatunnisa, Siti, " *Maslahah Mursalah* Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al-Ghazali", *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2021)
- HSB, Ali Marwan, " *Judicial Review* dan *Legislative Review* Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1 (Maret 2020).
- Manan, Bagir, Susi Dwi Harjanti, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Negara Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2017).

- Marlina, Rika, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018).
- Mediana, “Integrasi Pengujian Perturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2019).
- Yusuf, Muh, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Clavia Journal of Law*, Vol. 17 No. 1 (April 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang Tata Tertib, B.N.R.I Tahun 2020 Nomor 667.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, L.N.R.I Tahun 2020 Nomor 87.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, L.N.R.I Tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, L.N.R.I Tahun 2022 Nomor 143.
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, L.N.R.I Tahun 2019 Nomor 183.

Internet

DPR RI, Sekretariat Jenderal, “Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, ([http:// www.dpr.go.id/sejarah-dpr](http://www.dpr.go.id/sejarah-dpr), diakses pada hari Rabu 1 Maret 2023, pukul 11.33 WIB).

Lidya Julita S, “DPR Sahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Covid-19 Jadi Perppu”, (CNBC Indonesia, 12 Mei 2020, [https:// www.cnbnindonesia.com/news/dpr-sahkan-perppu-nomor-1-tahun-2020-covid-19-jadi-uu](https://www.cnbnindonesia.com/news/dpr-sahkan-perppu-nomor-1-tahun-2020-covid-19-jadi-uu), diakses pada Minggu, 26 Maret 2023 Pukul 14. 11 WIB).

Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Badan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, ([https:// kemendikbud. go. id/entri/Pengujian](https://kemendikbud.go.id/entri/Pengujian), diakses pada Kamis 16 Maret 2023 pada pukul 10.12 WIB).

RI, DPR, “Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM”, ([https :// www. youtube.com/live/ T_dxy8GYoFU?feature=share](https://www.youtube.com/live/T_dxy8GYoFU?feature=share), diakses pada Rabu, 22-23 Maret 2023).

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, (<http://peraturan.go.id/>, diakses pada Selasa, 7 dan 13 Maret 2023).